

Analysis of the influence of poverty, unemployment, Minimum wage, and PDRB on the Human Development Index of Bali Province in 2018-2022

Analisis Pengaruh Kemiskinan, Pengangguran, Upah Minimum, dan PDRB Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Bali Pada Tahun 2018-2022

Siti Nazirah^{1*}, Maulidyah Indira Hasmarini²

Universitas Muhammadiyah Surakarta^{1,2}

nazirahsiti34@gmail.com¹, mmaulidyah@ums.ac.id²

*Corresponding Author

ABSTRACT

This study aims to determine the analysis of the influence of poverty, unemployment, minimum wage, and GRDP on the Human Development Index of Bali province in 2018-2022. Data collection method in this study by downloading quantitative data in the form of secondary data from the Central Bureau of Statistics in the period 2018-2022, the data units are all districts/cities in Bali Province. The Data used were poverty, unemployment, minimum wage, GRDP and Human Development Index. The analysis tools used are multiple Linear regression analysis with econometric model estimation stage used include three approaches, namely common effect model (CEM), fixed effect model (FEM), and random effect model (REM); includes efficiency test model (F test), interpretation coefficient of determination (R^2) and T test. The results of the study provide evidence that the increase in the Human Development Index is strongly influenced by the minimum wage, from the test results the validity of the Human Development Index is positively influenced. This is because the higher the minimum wage, the community can increase its purchasing power and have an impact on the welfare of the people in Bali Province. While poverty, unemployment and GRDP have no influence on the Human Development Index, but the government should not underestimate because it could be that these three economic problems can have an impact on HDI.

Keywords: *poverty, unemployment, minimum wage, GRDP, Human Development Index*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis pengaruh kemiskinan, pengangguran, upah minimum, dan pdrb terhadap indeks pembangunan manusia provinsi bali pada tahun 2018-2022. Metode pengumpulan data pada penelitian ini dengan mengunduh data kuantitatif berupa data sekunder dari badan pusat statistik pada kurun waktu 2018-2022, unit data adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali. Data yang digunakan adalah kemiskinan, pengangguran, upah minimum, PDRB dan indeks pembangunan manusia. Alat analisis yang digunakan adalah Analisis Regresi Linear Berganda dengan tahap estimasi model ekonometrika yang digunakan meliputi tiga pendekatan yaitu *common effect model* (CEM), *fixed effect model* (FEM), dan *random effect model* (REM); meliputi uji efisiensi model (uji F), interpretasi koefisien determinasi (R^2) dan uji t. Hasil penelitian memberikan bukti bahwa peningkatan indeks pembangunan manusia sangat dipengaruhi oleh upah minimum, dari hasil uji validitas indeks pembangunan manusia dipengaruhi secara positif. Hal ini dikarenakan semakin tinggi upah minimum maka masyarakat dapat meningkatkan daya belinya dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali. Sedangkan kemiskinan, pengangguran dan PDRB tidak memiliki pengaruh terhadap indeks pembangunan manusia, akan tetapi pemerintah tidak boleh menganggap remeh karena bisa saja ketiga masalah ekonomi tersebut dapat berdampak pada IPM.

Kata Kunci: *kemiskinan, pengangguran, upah minimum, PDRB, indeks pembangunan manusia*

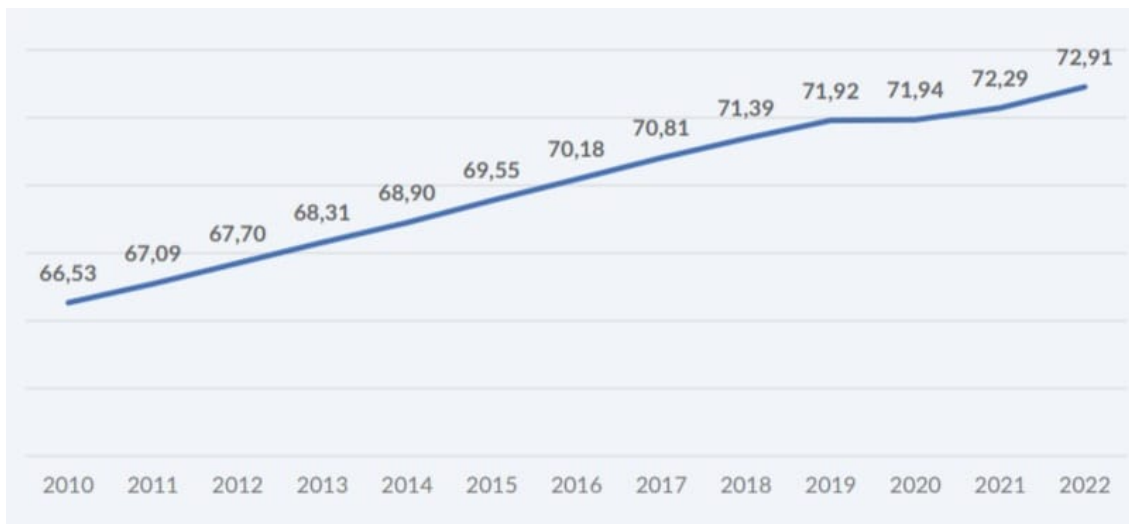
1. Pendahuluan

Indeks pembangunan Manusia merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan untuk mengetahui apakah masyarakat di negara itu berkehidupan sejahtera dan mendapatkan

pelayanan yang menjamin untuk keberlangsungan hidup mereka atau tidak. Pelayanan seperti mendapatkan pendidikan yang bagus, mendapatkan pekerjaan yang layak, dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dengan tujuan untuk mencapai standar hidup yang layak. Melalui UNDP (United Nation of Development Program) keberhasilan indeks pembangunan manusia diukur menggunakan tiga indikator yaitu angka harapan hidup untuk mengukur kualitas kesehatan, angka melek huruf untuk mengukur kualitas pendidikan dan indikator daya beli untuk mengukur kualitas standar hidup layak (Fatimah, 2014).

Pengutamaan dalam proses pembangunan sangat penting untuk memastikan pemanfaatan sumber daya yang menunjang indikator-indikator diatas. Pemerintah dan pihak yang bersangkutan bisa lebih fokus dalam upaya dan anggaran pada proyek yang berhubungan terhadap kebutuhan masing-masing wilayah, Menerapkan pendekatan yang berfokus pada pengutamaan pembangunan memungkinkan lebih tepat sasaran dan responsif terhadap perubahan lingkungan dan sosial dari waktu ke waktu. Keadaan ini dapat memastikan hasil yang positif yang sesuai dengan beragamnya kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah, kemudian dapat meningkatkan kualitas hidup penduduk di wilayah tersebut (Kawashita & Marseto, 2024).

Pembangunan manusia di Indonesia terus mengalami kemajuan. Sejak tahun 2016, status pembangunan manusia Indonesia meningkat dari level “sedang” menjadi “tinggi”. Selama 2010–2022, IPM Indonesia rata-rata meningkat sebesar 0,77 persen per tahun, dari 66,53 pada tahun 2010 menjadi 72,91 pada tahun 2022. Setelah mengalami perlambatan pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19, pada 2021 dan 2022 peningkatan IPM Indonesia terus mambaik seiring dengan penanganan pandemi COVID-19 yang berjalan baik dan pemulihan kinerja ekonomi Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2022) Seperti terlihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia, 2010-2022

Sumber: BPS Indonesia 2022

Bali merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki 9 kabupaten/kota dimana setiap kabupaten/kotanya memiliki sumber daya manusia, budaya, dan wisata yang unggul daripada provinsi lainnya di Indonesia. Dengan banyaknya kabupaten/kota di Bali tentunya akan memberikan gambaran tentang indeks pembangunan manusia yang beragam. tercatat bahwa setiap tahun capaian pembangunan manusia di Bali mengalami kemajuan, terlihat pada tahun 2022 tiga Kabupaten/kota yang Nilai IPM yang tinggi yaitu Kab/kota Denpasar, Badung, dan Gianyar masing-masing memiliki nilai 84.37%, 82.13% dan 78.39% Seperti terlihat pada Table 1.

Tabel 1. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/kota Provinsi Bali, 2018-2022

| Kabupaten/kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Kab.Jembrana | 71.65 | 72.35 | 72.36 | 72.75 | 73.58 |
| Kab.Tabanan | 75.45 | 76.16 | 76.17 | 76.45 | 73.58 |
| Kab.Badung | 80.87 | 81.59 | 81.6 | 81.83 | 82.13 |
| Kab.Gianyar | 76.61 | 77.14 | 77.36 | 77.7 | 78.39 |
| Kab.Klungkung | 70.9 | 71.71 | 71.73 | 71.75 | 72.55 |
| Kab.Bangli | 68.96 | 69.35 | 96.39 | 69.37 | 70.26 |
| Kab.Karangasem | 66.49 | 67.34 | 67.35 | 67.36 | 68.28 |
| Kab.Buleleng | 71.7 | 72.3 | 72.55 | 72.56 | 73.45 |
| Kab.Denpasar | 83.33 | 83.68 | 83.93 | 84.03 | 84.37 |

Sumber: BPS Provinsi Bali 2018-2022

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dipengaruhi oleh berbagai faktor, terutama faktor sosial ekonomi. Menurut kajian BPS Jakarta tahun 2009, yang menggunakan data cross section dari provinsi-provinsi di Indonesia tahun 2008, disimpulkan bahwa IPM di setiap provinsi dipengaruhi oleh variabel seperti laju pertumbuhan ekonomi, persentase penduduk dengan keluhan kesehatan, rata-rata usia pernikahan pertama wanita, setengah pengangguran dengan jam kerja per minggu kurang dari 15 jam, persentase desa yang menggunakan listrik, dan persentase desa dengan jarak ke SMP terdekat lebih dari 10 km (Chalid & Yusuf, 2014). Dalam mengatasi permasalahan ekonomi perlunya keberhasilan dalam pembangunan manusia karena pembangunan manusia merupakan suatu langkah perubahan dari yang tidak ada menjadi ada dengan kata lain pembangunan merupakan perubahan ke sisi yang lebih baik (Nadila, 2022). Selain itu, ada beberapa macam permasalahan-permasalahan ekonomi yang sering muncul seperti kemiskinan, pengangguran dan upah minimum yang dapat berdampak pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks. Kemiskinan bukan hanya berkaitan dengan masalah kecilnya tingkat pendapatan dan konsumsi, akan tetapi berkaitan juga dengan kecilnya tingkat pendidikan, kesehatan, ketidakterdayaan untuk ikut serta dalam pembangunan serta berbagai masalah yang berkaitan dengan pembangunan manusia (Tumewu et al., 2022). Tingkat pengangguran juga dianggap mempunyai dampak yang besar terhadap IPM, karena pengangguran dapat memicu kebutuhan ekonomi yang tidak terpenuhi sehingga masyarakat tidak bisa mengakses yang penting untuk menunjang pembangunan manusia.

Pengangguran adalah situasi di mana seseorang tidak memiliki pekerjaan atau sedang aktif mencari pekerjaan (Axelrad et al., 2018). Angkatan kerja mencakup laki-laki dan perempuan berusia 15-64 tahun. Pengangguran juga bisa disebabkan oleh masalah pendidikan (Sirilius, 2017). Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki individu di suatu daerah, semakin besar kemungkinan mereka mencari pekerjaan di luar daerah tersebut. Pendidikan yang lebih tinggi memperluas pilihan migrasi individu, tidak hanya menawarkan upah yang lebih tinggi tetapi juga menjamin hak-hak mereka sebagai pekerja.

Upah minimum adalah standar minimum yang digunakan oleh pengusaha atau pelaku industri untuk membayar pekerja di lingkungan kerja mereka. Upah ini diberikan dalam bentuk uang sebagai kompensasi dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh, yang ditetapkan dan dibayarkan berdasarkan perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan. Upah ini mencakup tunjangan untuk pekerja atau buruh serta keluarganya, sebagai imbalan atas pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan (Nurfiat & Rustariyuni, 2018). Tingkat upah dapat bervariasi berdasarkan sektor pekerjaan, lokasi geografis usaha, pendidikan dan keterampilan tenaga kerja, jenis kelamin, proporsi biaya tenaga

kerja terhadap total biaya produksi, proporsi keuntungan terhadap penjualan, skala organisasi, kelangkaan tenaga kerja, kekuatan serikat pekerja, dan jenis jabatan (Megantara & Budhi, 2020).

Selanjutnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah sebuah indikator penting untuk menilai perkembangan ekonomi suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu, baik dengan menggunakan harga aktual maupun harga tetap. PDRB secara pokok menggambarkan total nilai tambah yang dihasilkan oleh semua unit usaha di wilayah tersebut. Total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan dari kegiatan produksi harus sama dengan nilai barang yang digunakan. PDRB berdasarkan harga berlaku mencerminkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku pada periode yang bersangkutan, sedangkan PDRB berdasarkan harga tetap menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung dengan menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai acuan (Muliza et al., 2017).

Salah satu faktor penentu kemakmuran suatu masyarakat dan kesuksesan pembangunan suatu daerah, terutama dari perspektif ekonomi, adalah peningkatan Produk Nasional Bruto (PNB) di tingkat nasional, sedangkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memengaruhi penurunan tingkat kemiskinan di suatu wilayah (Ariwuni Dwi A & Kartika N, 2019).

Banyak penelitian sebelumnya yang mengeksplorasi pengaruh hubungan antara masalah ekonomi yang sering terhadap indeks pembangunan manusia. Misalnya (Luckynuari, 2018) menunjukkan bahwa secara bersama-sama, kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, upah minimum, dan jumlah penduduk berpengaruh nyata terhadap IPM. Namun periode penelitian tersebut hanya sampai pada tahun 2020 dan pendekatan penelitian yang digunakan tidak memperhatikan dimensi individu maupun waktu .

Penelitian ini berusaha untuk memperbarui literatur dengan menambahkan variabel yang belum diteliti dan periode tahun yang terbaru di Provinsi Bali yang mana Provinsi tersebut sangat terkenal dengan kekayaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang mencukupi. Hasil penelitian ini nantinya tidak hanya memperkaya literatur yang ada dengan data dari provinsi yang kurang terwakili, tetapi juga memiliki implikasi penting untuk pengembangan pembangunan di Provinsi yang diteliti.

Penanggulangan masalah Indeks pembangunan bukanlah hal yang mudah, tetapi perbaikan indeks pembangunan manusia dapat dilakukan dengan meningkatkan standar sumber daya manusia yang paling baik melalui pendidikan. Tanpa individu dengan tingkat wawasan yang tinggi dan faktor sosial seperti ekonomi, kesehatan yang baik, dan pola makan yang seimbang maka indeks pembangunan manusia tidak akan bertahan jangka panjang (Jafba & Juanda, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kemiskinan, pengangguran, upah minimum, dan PDRB terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota provinsi Bali pada tahun 2018-2022.

2. Metode Penelitian

Metode pengumpulan data pada penelitian ini dengan mengunduh data kuantitatif berupa data sekunder dari badan pusat statistik pada kurun waktu 2018-2022. unit data adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali. Data yang digunakan adalah kemiskinan, pengangguran, upah minimum, PDRB dan indeks pembangunan manusia.

Alat analisis yang digunakan adalah Analisis Regresi Linear Berganda yang digunakan untuk melihat pengaruh yaitu kemiskinan, pengangguran, upah minimum, dan PDRB terhadap indeks pembangunan manusia. Adapun persamaan regresinya, yaitu :

$$IPM_{it} = \beta_0 + \beta_1 \log JPM_{it} + \beta_2 TP_{it} + \beta_3 \log UM_{it} + \beta_4 \log PDRBHL_{it} + \epsilon_{it}$$

Dimana IPM menunjukkan indeks pembangunan manusia, JPM menunjukkan jumlah penduduk miskin (ribu jiwa), TP menunjukkan tingkat pengangguran (%), UM menunjukkan upah minimum (ribu rupiah), dan PDRBHL menunjukkan PDRB perkapita (ribu rupiah).

Tahap estimasi model ekonometrika yang digunakan meliputi tiga pendekatan yaitu *common effect model* (CEM), *fixed effect model* (FEM), dan *random effect model* (REM); meliputi uji efisiensi model (uji F), interpretasi koefisien determinasi (R^2) dan uji t.

4. Hasil dan Pembahasan

Hasil estimasi model ekonometrika di muka dengan pendekatan CEM, FEM, dan REM beserta hasil uji pemilihan modelnya terangkum pada Tabel 2.

Tabel 2. Uji Chow dan Uji Hausman

| Variabel | Koefisien Regresi | | |
|--|-------------------|-----------|-----------|
| | CEM | FEM | REM |
| C | -205,1911 | -32,35829 | -76,08133 |
| logJPM | -0,296464 | 0,541660 | 0,137472 |
| TP | 0,200785 | -0,067112 | -0,049915 |
| logUM | 10,30987 | 6,802739 | 8,014038 |
| logPDRBHL | 11,88360 | 0,505950 | 3,009280 |
| R^2 | 0,746719 | 0,991743 | 0,328743 |
| Adjusted. R^2 | 0,721391 | 0,988647 | 0,261617 |
| Statistik F | 29,48188 | 320,3075 | 4,897419 |
| Prob. Statistik F | 0,0000 | 0,0000 | 0,002613 |
| Uji Pemilihan Model | | | |
| (1) Chow | | | |
| Cross- Section $F(8,32) = 118,704730$; Prob. $F(8,32) = 0,0000$ | | | |
| (2) Hausman | | | |
| Cross-Section random $\chi^2(4) = 28,672231$; Prob. $\chi^2 = 0,0000$ | | | |
| Sumber ;BPS,diolah | | | |

Uji Chow dan uji Hausman memperlihatkan bahwa (FEM) terpilih sebagai model terestimasi terbaik, terlihat dari probabilitas atau signifikansi empirik statistik F dan statistik χ^2 yang masing-masing bernilai 0,0000 (<0,01). Hasil estimasi lengkap dari model terestimasi FEM, terlihat pada table 3 dan 4.

Tabel 3. Model Estimasi Fixed Effect Model (FEM)

| | | | |
|---|-----------|----------|----------|
| $IPM_{it} = -32,35829 + 0,541660 \log JPM_{it} - 0,067112 TP_{it}$ | | | |
| | (0,3652) | (0,5369) | (0,3644) |
| $+ 6,802739 \log UM_{it} + 0,505950 \log PDRHL_{it}$ | | | |
| | (0,0030)* | (0,6726) | |
| $R^2 = 0,991743$; DW = 1,554711; F. = 320,3075; Prob. F = 0,0000 | | | |
| Sumber : BPS, diolah. Keterangan : *Signifikan pada $\alpha = 0,01$; **Signifikan pada $\alpha = 0,05$; ***Signifikan pada $\alpha = 0,10$; Angka di dalam kurung adalah probabilitas nilai statistik t. | | | |

Tabel 4. Efek dan Konstan Wilayah

| No | Kabupaten/Kota | Efek Wilayah | Konstanta |
|----|----------------|--------------|------------|
| 1. | Kab. Jembarana | -1.79577 | -3.415.506 |
| 2. | Kab. Tabanan | 0.770904 | -3.235.829 |
| 3. | Kab. Badung | 6.036257 | 2.800.428 |
| 4. | Kab. Gianyar | 2.704837 | -530.992 |

| | | | |
|----|-----------------|-----------|------------|
| 5. | Kab. Klungkung | -2.357365 | -3.471.566 |
| 6. | Kab. Bangli | -4.466171 | -3.682.446 |
| 7. | Kab. Karangasem | -7.281396 | -3.308.643 |
| 8. | Kab. Buleleng | -2.239098 | -3.258.220 |
| 9. | Denpasar | 8.627797 | 5.391.968 |

Sumber:BPS,Diolah

Dari Tabel 3 terlihat model terestimasi *FEM* eksis dengan probabilitas atau signifikansi empirik statistik *F* bernilai 0,0000 ($< 0,01$), dengan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,991743; hal ini berarti bahwa 99,1743% yang diamati pada variabel IPM dijelaskan oleh variabel JPM,TP,UM dan PDRB. Sedangkan 8,275% lainnya disebabkan oleh variabel lain diluar model. Variabel upah minimum (*UM*) yang memiliki pengaruh terhadap indeks pembangunan manusia dengan probabilitas atau signifikansi empirik statistik *t* sebesar 0,0030 ($< 0,01$). Sedangkan variabel JPM,TP,dan PDRB tidak memiliki pengaruh terhadap indeks pembangunan manusia karena *t* statistik masing-masing sebesar 0,5369 $> (0,10)$, 0,3644 $> (0,10)$, dan 0,6726 $> (0,10)$.

Variabel upah minimum memiliki nilai koefisien regresi sebesar 6,802739 dengan pola hubungan linier-linier. Artinya, apabila upah minimum mengalami kenaikan sebesar 1%, maka indeks pembangunan manusia akan mengalami kenaikan sebesar 680,27%. Sebaliknya, jika upah minimum mengalami penurunan sebesar 1%, maka indeks pembangunan manusia akan menurun sebesar 680,27%.

Interpretasi Ekonomi

Hasil penelitian menemukan bahwa kemiskinan tidak berpengaruh terhadap IPM di provinsi Bali,maka dari itu kenaikan maupun penurunan dari tingkat kemiskinan tidak memberikan pengaruh terhadap IPM.Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mahendra, 2020) yang menyatakan bahwa kemisknkan tidak berpengaruh terhadap IPM.

Kemiskinan tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia menunjukkan adanya peningkatan daya beli masyarakat di kategori menengah ke bawah. Ini mengindikasikan bahwa kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya cukup tinggi. Daya beli masyarakat adalah salah satu indikator komposit dari indeks pembangunan manusia. Strategi pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat meliputi menjamin stabilitas harga kebutuhan pokok dan memastikan ketersediaannya di pasar maupun gudang sebagai cadangan atau persediaan. Hal ini mencerminkan bahwa kemampuan individu atau kelompok dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, yang merupakan hak mereka sebagai manusia dan warga negara telah terpenuhi (Zamahir, 2016)

Pengangguran dalam penelitian ini tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Bali. Hal ini menunjukan bahwa meskipun terjadi peningkatan pengangguran,namun tidak memberikan pengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nakyah, Fitratul, Muhammad Alwi, 2024) yang menyatakan bahwa pengangguran tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi NTB.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut salah satunya adalah fluktuasi permintaan pasar yang bersifat sementara atau peningkatan jumlah pekerja yang tidak selalu memberikan dampak signifikan terhadap tingkat pengangguran jika sifatnya hanya sementara atau dapat dengan cepat diserap oleh pasar tenaga kerja. Penyebab lainnya bisa berupa penurunan pertumbuhan ekonomi, kesenjangan keterampilan antara pencari kerja dan kebutuhan pasar tenaga kerja, serta perubahan teknologi yang sangat cepat yang dapat mengurangi kesempatan kerja akibat otomatisasi.Adapun penelitian lain yang mendukung

penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Sheppard et al., 2020) hasilnya menyatakan secara parsial bahwa pengangguran tidak berpengaruh terhadap IPM di Kabupaten Bojonegoro. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh (Kuswandi, 2020) menyatakan bahwa pengangguran berpengaruh negatif terhadap IPM di Provinsi NTB.

Dalam penelitian ini upah minimum memiliki pengaruh yang positif terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Bali. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori dana upah, yaitu standar senior mill, yang menyatakan bahwa upah seharusnya mencukupi seluruh kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya. Ketika upah meningkat, daya beli masyarakat juga meningkat. Dengan demikian, kebutuhan pekerja dan keluarganya akan terpenuhi, baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun untuk kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Cahyanti & Fevriera, 2020) menyatakan bahwa upah minimum berpengaruh positif di Provinsi Jawa Tengah, begitupun dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Herman, 2021).

PDRB tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Bali. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mauludin & Dewi, 2020) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi/PDRB tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Banten.

Hal tersebut menandakan bahwa peningkatan maupun penurunan IPM tidak dipengaruhi oleh PDRB. Namun hasil ini bertolak belakang dengan teori modal manusia teori ini menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia di wilayah tersebut, salah satunya adalah kualitas pendidikannya. Adapun penelitian ini hasilnya bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh (Islamiatus Izzah & Martha Hendarti, 2021) berpendapat bahwa PDRB berpengaruh yang positif terhadap tingkat IPM di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dikarenakan semakin tinggi tingkat PDRB maka akan meningkatkan kualitas hidup layak masyarakat sehingga berdampak pada kesejahteraan bagi masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.

5. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan indeks pembangunan manusia sangat dipengaruhi oleh upah minimum, dari hasil uji validitas indeks pembangunan manusia dipengaruhi secara positif. Hal ini dikarenakan semakin tinggi upah minimum maka masyarakat dapat meningkatkan daya belinya dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali. Sementara itu kemiskinan, pengangguran, dan PDRB tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Bali, akan tetapi pemerintah tidak boleh menganggap remeh karena bisa saja ketiga masalah ekonomi tersebut dapat berdampak pada IPM.

Pemerintah diharapkan dapat menetapkan upah minimum yang didasarkan pada kebutuhan hidup layak, sehingga upah yang diterima pekerja cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka termasuk pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Dengan mengimplementasikan hal tersebut pemerintah dapat membantu memastikan bahwa kebijakan upah minimum tidak hanya meningkatkan kesejahteraan pekerja, tetapi juga mendorong pembangunan manusia yang berkelanjutan dan inklusif.

Daftar Pustaka

- Ariwuni Dwi A, M., & Kartika N, I. (2019). Pengaruh Pdrb Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap ipm Dan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 8(12), 2927–3958.
- Axelrad, H., Malul, M., & Luski, I. (2018). Unemployment among younger and older individuals: does conventional data about unemployment tell us the whole story? *Journal for Labour Market Research*, 52(1). <https://doi.org/10.1186/s12651-018-0237-9>

- Badan Pusat Statistik. (2022). Berita Resmi Statistik Tahun 2022. *Badan Pusat Statistik*, 62, 1–8.
- Cahyanti, S. A., & Fevriera, S. (2020). The Effect of Regional Minimum Wage and Inflation on HDI in Central Java. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 18(2), 152. <https://doi.org/10.22219/jep.v18i2.12869>
- Chalid, N., & Yusuf, Y. (2014). Pengaruh Tingkat Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Kabupaten/Kota Dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau. *Jurnal Ekonomi*, 22(2), 1–12. <http://ejournal.unri.ac.id/index.php/JE/article/viewFile/2592/2547%0A>
- Fatimah, S. N. (2014). Analisis Pengaruh Kemiskinan, Pengangguran Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Banten Tahun 2010-2015. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 7(2), 107–115.
- Herman, H. (2021). Impact of Inflation and City Minimum Wages on Human Development Index in Indonesia. *Husnayain Business Review*, 1(1), 78–86. <https://doi.org/10.54099/hbr.v1i1.5>
- Islamiatus Izzah, C., & Martha Hendarti, I. (2021). Analisis Pengaruh Tenaga Kerja, Tingkat Upah, Dan Pdrb Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Di Provinsi Jawa Tengah. *OIKOS Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi*, 5, 99–106. <https://doi.org/10.23969/oikos.v5i2.3392>
- Kawashita, I. W. R., & Marseto, M. (2024). Analysis of the Influence of Open Unemployment Rate, Poverty Rate, and Economic Growth on the Human Development Index in Sleman Regency. *East Asian Journal of Multidisciplinary Research*, 2(12), 5069–5078. <https://doi.org/10.55927/eajmr.v2i12.7320>
- Kuswandi, A. (2020). Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Pariwisata Di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 8(2), 90–113. <https://doi.org/10.34010/agregasi.v8i2.3817>
- Luckynuari, P. A. D. I. (2018). *PEMBANGUNAN MANUSIA (Studi Kasus Kabupaten / Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)*.
- Mahendra, A. (2020). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Kesehatan, Inflasi Dan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 20(September), 174–186. <https://doi.org/10.54367/jmb.v20i2.1010>
- Mauludin, W., & Dewi, R. M. (2020). Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Banten. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 8(3), 116–121. <https://doi.org/10.26740/jupe.v8n3.p116-121>
- Megantara, D. E., & Budhi, M. K. S. (2020). Pengaruh Angka Melek Huruf dan Upah Minimum terhadap Tingkat Pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 9(1), 91–119.
- Muliza, M., Zulham, T., & Seftarita, C. (2017). Analisis Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Tingkat Kemiskinan Dan Pdrb Terhadap Ipm Di Provinsi Aceh. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 3(1), 51–69. <https://doi.org/10.24815/jped.v3i1.6993>
- Nadila, A. (2022). Analisis Pengaruh Kemiskinan, Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Banten. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(11), 3851–3860. <https://eprints.umm.ac.id/80396/%0Ahttps://eprints.umm.ac.id/80396/1/PENDAHULUAN.pdf>
- Nakyah, Fitriatul, Muhammad Alwi, E. A. (2024). Analysis of the Influence of Poverty Levels, Unemployment and Economic Growth on the Human Development Index in Nusa Tenggara Barat Province 2017-2022. *Economy and Finance Enthusiastic*, 2(1), 8–18.
- Nurfiat, N. A., & Rustariyuni, S. D. (2018). Pengaruh Upah dan Teknologi Terhadap Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Mebel di Kota Denpasar. *Jurnal Kependudukan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, 14(1), 34–48.

- Sheppard, E., Sparks, T., & Leitner, H. (2020). World Class Aspirations, Urban Informality, and Poverty Politics: A North–South Comparison. *Antipode*, 52(2), 393–407. <https://doi.org/10.1111/anti.12601>
- Sirilius, S. (2017). Hubungan Antara Pendidikan, Pengangguran, dan Pertumbuhan Ekonomi dengan Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 10(2), 59–71.
- Tumewu, Chistian, D., A.J, M. V., & Masloman, I. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian Dan Kapasitas Anggaran Pedesaan Terhadap Jumlah Kemiskinan Di Kabupaten Minahasa. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 22(4), 47–61.
- Zamahir, A. (2016). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, PDRB Perkapita dan Upah Minimum Terhadap Human Development Index : Studi Kasus 12 Provinsi Dengan Kategori Lower Medium Di Indonesia*. 4(August), 30–59.